

Marhaenisme sebagai Rekontekstualisasi Marxisme dalam Pemikiran Sukarno

Fauzian Aulia Muslim*, Yety Rochwulaningsih, Sri Sudarsih

Program Studi S2 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jl. dr. A. Soeroyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

*Penulis korespondensi: fauzianauliam@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v10i1.72404>

Diterima/ Received: 12 April 2025; Direvisi/ Revised: 7 Januari 2026; Disetujui/ Accepted: 8 Januari 2026

Abstract

This study aims to analyze Marhaenism as an ideology of struggle for marginalized groups that emerged from a process of dialectical engagement and recontextualization of Sukarno's thought in relation to Marxism within the Indonesian context. The research employs the historical method, consisting of heuristic research, source criticism, interpretation, and historiography. The findings demonstrate that Marhaenism adopts the concept of class analysis from Marxism, yet does not apply it in a dogmatic manner. Sukarno reflected on the material conditions of Indonesian society, which differed significantly from the European context, where the oppressed class largely consisted of proletarians who did not own the means of production. In contrast, oppressed classes in Indonesia encompassed a broad spectrum of social groups, ranging from those without means of production to small-scale owners of productive assets. Sukarno referred to this oppressed class as the "Marhaen," which included peasants, fishermen, small traders, and workers. Through this process of recontextualization, Sukarno developed distinctive concepts such as the Marhaen social class, Socio-Nationalism, and Socio-Democracy as an ideological framework of struggle suited to Indonesia's social realities. This study therefore argues that Marhaenism represents a creative adaptation of Marxism rooted in the historical and social conditions of Indonesian society, offering an alternative ideology of emancipation for marginalized groups beyond the framework of orthodox Marxism.

Keywords: Sukarno; Marhaenism; Marxism; Class Structure; Indonesian Political Thought.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan kaum marjinal yang lahir dari proses dialektika dan rekontekstualisasi pemikiran Sukarno terhadap Marxisme dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marhaenisme mengadopsi konsep analisis kelas dari Marxisme, namun tidak menerapkannya secara dogmatis. Sukarno merefleksikan kondisi material masyarakat Indonesia yang berbeda dari konteks Eropa, di mana kelas tertindas tidak semata-mata terdiri atas proletariat yang tidak memiliki alat produksi, melainkan mencakup spektrum luas kelompok sosial yang memiliki alat produksi dalam skala kecil. Kelompok inilah yang oleh Sukarno disebut sebagai "Marhaen", meliputi petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh. Melalui proses rekontekstualisasi tersebut, Sukarno mengembangkan konsep-konsep khas seperti kelas sosial Marhaen, Sosio-Nasionalisme, dan Sosio-Demokrasi sebagai kerangka ideologis perjuangan yang sesuai dengan realitas sosial Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Marhaenisme merupakan bentuk adaptasi kreatif Marxisme yang berakar pada kondisi historis dan sosial masyarakat Indonesia, sekaligus menawarkan alternatif ideologi pembebasan bagi kaum marjinal di luar kerangka Marxisme ortodoks.

Kata Kunci: Sukarno; Marhaenisme; Marxism; Struktur Kelas; Pemikiran Politik Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Secara umum, perlawanan itu merupakan kulminasi kemarahan kaum Bumiputera yang termarginalisasi oleh

sistem sosial-politik pemerintah kolonial. Sebelum Abad ke-20, resistensi kaum Bumiputera kerap mengalami kegagalan akibat sifat kedaerahan yang tidak terorganisasi sehingga sangat mudah dipecah belah (Widiyanto dkk. 2022, 140). Perlawanan kedaerahan merupakan

gejolak politik khas feodalisme Indonesia karena Hindia Belanda masih dipimpin para penguasa tradisional.

Pada Abad ke-20, kebijakan politik etis berhasil mendorong lahirnya kaum intelektual Bumiputera yang segera menggantikan peran penguasa lokal. Senjata kaum Bumiputera bukan lagi senjata tradisional, melainkan ideologi. Kemunculan organisasi modern berbasis ideologi tidak lepas dari peran kaum intelektual. Mereka berupaya melampaui sekat-sekat kedaerahan melalui organisasi bercorak nasional.

Ideologi Marxisme, Nasionalisme, dan Islamisme menjadi tiga ideologi yang diproyeksi sebagai alat pembebasan. Boedi Oetomo (BO), Sarekat Islam (SI), Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Perhimpunan Indonesia (PI) masing-masing mengadopsi salah satu dari tiga ideologi itu. Namun, perjuangan ideologis yang seharusnya membawa emansipasi sosial, malah bergerak secara eksklusif dan sektarian akibat perbedaan ideologi.

Kondisi ini memicu perpecahan yang tidak terhindarkan antar sesama gerakan pembebasan. Berangkat dari kondisi itu, Sukarno berupaya merumuskan sintesis politik persatuan berbasis ideologi sosialisme khas Indonesia yang dikenal sebagai Marhaenisme.

Istilah Marhaen merupakan hasil refleksi Sukarno atas kondisi material masyarakat Indonesia. Meminjam pisau analisis Marxisme, Sukarno mengamati perbedaan mencolok antara corak produksi masyarakat Indonesia dan Eropa. Bertolak belakang dengan kondisi Eropa yang telah mengalami proses industrialisasi secara matang sehingga corak produksi masyarakatnya tergolong kapitalisme murni. Kondisi masyarakat Indonesia masih bergantung pada sektor agrikultur perkebunan dan industri perkebunan sehingga corak produksi masyarakatnya masih dalam tegangan antara feodalisme dan kapitalisme.

Masyarakat Eropa secara tajam melahirkan antagonisme kelas antara borjuasi dan proletariat yaitu hubungan produksi yang terbentuk dari kepemilikan alat produksi, sementara relasi produksi Indonesia sangat variatif mulai dari tuan tanah, borjuasi besar, borjuasi kecil, budak tani, petani bebas, hingga proletariat itu sendiri. Itu

artinya subjek tertindas di Indonesia bukan hanya kaum yang tidak memiliki alat produksi, melainkan juga kaum yang memiliki alat produksi kecil-kecilan sebagaimana tergambar pada sosok Marhaen. Bertolak dari analisis tersebut, Sukarno menjadikan Marhaen sebagai simbol seluruh kaum tertindas Indonesia yang terdiri atas petani, pedagang kecil, nelayan, kusir, hingga buruh.

Kaum Marhaen mengalami berbagai penindasan dari feodalisme, kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme. Sebagaimana Marx dan Engels yang memproyeksi proletariat sebagai kelas terdepan yang akan menumbangkan kelas borjuasi dan tatanan kapitalisme. Sukarno menempatkan Marhaen sebagai kelas yang akan menumbangkan feodalisme bangsa sendiri, kapitalis-imperialis bangsa asing, beserta tatanan sosio-politik yang melingkupinya. Konsepsi politik dalam Marhaenisme merupakan hasil dialektika dan adaptasi Sukarno atas Marxisme yang coba diterapkan di Indonesia. Sukarno menjadikan teori materialisme historis Marxisme sebagai panduan dasar untuk membaca gejala-gejala perkembangan corak produksi masyarakat Indonesia. Perubahan corak produksi menjadi dasar perubahan ideologis masyarakat (Sukarno 1947, 133). Berkat materialisme historis pula, Sukarno mampu merumuskan gagasan persatuan seluruh kaum marjinal Indonesia dalam sebuah wadah kelas tertindas Marhaen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan kaum tertindas berlandaskan corak pemikiran Marxisme Sukarno. Marxisme dijadikan sebagai elemen fundamental dalam ideologi Marhaenisme. Visi emansipatoris Marxisme juga memiliki keserupaan dengan Marhaenisme yakni membangun dunia baru tanpa penindasan.

Sejauh ini penelitian yang mengkaji Marhaenisme hanya berbicara mengenai ajaran Sukarno, hubungannya dengan Pancasila, maupun penerapan dalam konteks politik. Penelitian yang ditulis Bimo Rafi Widiyanto menekankan Marhaenisme sebagai ideologi pergerakan dan relevansinya dengan pembentukan gagasan Pancasila (Widiyanto dkk. 2022). Vhiasyah Raeinady dan Jagad Aditya Dewantara membahas ajaran Marhaenisme dan

penerapannya di tengah pandemi Covid-19 (Raenady dan Dewantara 2021). Febri Fajar Pratama mengkaji Marhaenisme sebagai sebuah konsep ideologi perjuangan dan relevansinya dengan kondisi sosio-politik pasca reformasi (Pratama dkk. 2022). Galang Geraldy meneliti konsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menerapkan ajaran-ajaran Marhaenisme (Geraldy 2019).

Bertolak dari diskursus kajian penelitian yang telah ada sebelumnya, pembahasan Marhaenisme yang menekankan dialektika pemikiran Sukarno dengan Marxisme belum pernah diuraikan secara mendalam dan komprehensif. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada aspek dialektika tersebut sebagai bentuk pengembangan kajian penelitian mengenai pemikiran Marhaenisme. Pembahasan terdiri atas beberapa sub-bab antara lain mengenai sejarah kelahiran Marhaenisme, Proletar dan Marhaen sebagai subjek revolusi, dan konsep Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi sebagai jalan menuju sosialisme Indonesia.

Metode

Penelitian ini didasarkan pada kaidah-kaidah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses pengujian dan analisis atas rekaman peninggalan masa lampau (Gottschalk 1983, 32). Metode sejarah meliputi beberapa tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik adalah proses pengumpulan sumber sejarah yang terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang membahas mengenai pemikiran Marhaenisme antara lain *Dibawah Bendera Revolusi Djilid I*, *Dibawah Bendera Revolusi Djilid II*, *Indonesia Menggugat*, *Njalakan Terus Api Marhaenisme!*, *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, *Penjambung Lidah Rakjat* dan beberapa artikel yang dimuat dalam majalah *Fikiran Ra'jat*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber primer mengenai Marxisme seperti *Manifesto of the Communist Party* dan *The German Ideology* untuk menjelaskan dialektika pemikiran Sukarno dengan Marxisme. Sumber-sumber tersebut digolongkan sebagai sumber primer karena berasal dari pelaku dan saksi sejarah, bertolak belakang dengan

sumber sekunder yang bukan berasal dari pelaku dan saksi sejarah langsung. Sumber sekunder juga digunakan untuk menambah keterangan yang belum ada pada sumber primer. Sumber sekunder yang digunakan adalah artikel dan buku yang relevan dengan kajian Marhaenisme.

Tahap kritik sumber terbagi menjadi dua: kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern menguji otentisitas atau keaslian sumber. Kritik intern menguji kredibilitas atau keabsahan sumber yang digunakan. Kritik ekstern berfokus pada aspek fisik sumber, sementara kritik intern berfokus pada aspek isi atau substansi dari sumber.

Tahap interpretasi merupakan proses penafsiran setelah melalui dua tahapan kritik sumber. Proses penafsiran dilakukan dengan menganalisis keterkaitan fakta-fakta sejarah berserta keterkaitan variabel Marhaenisme Sukarno dengan Marxisme. Proses analisis dibantu dengan teori materialisme historis. Pada tahap historiografi, seluruh fakta yang telah diinterpretasikan disajikan dalam bentuk tulisan sejarah yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

Kelahiran Marhaenisme: Dialektika Sukarno dan Marxisme (1927-1933)

Konteks situasi politik reaksioner pergerakan nasional yang menekan berbagai aktivitas politik kaum Bumiputera mendorong inisiatif Sukarno untuk menggagas suatu perlawanan berbasis persatuan gerakan. Kemandulan gerakan politik Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme sebagaimana yang terjadi pada Boedi Oetomo, Sarekat Islam, *Indische Partij*, PKI dan Perhimpunan Indonesia dipicu oleh sektarianisme kelompok ideologis masing-masing. Setiap gerakan memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Gerakan Islamis menghendaki politik berbasis agama, gerakan Marxis menghendaki peleburan entitas kebangsaan dan agama, gerakan nasionalis menghendaki kemerdekaan suatu bangsa semata.

Sukarno melihat perlunya suatu teori perlawanan yang berorientasi pada aspek persatuan ketiga kelompok ideologis tersebut. Teori perlawanan yang didasarkan pada filsafat sosialisme Indonesia hasil rekontekstualisasi pemikiran Sukarno atas Marxisme. Marxisme

dipilih sebagai landasan ideologis karena mampu mengartikulasikan corak produksi masyarakat Indonesia yang khas. Dalam situasi seperti inilah, Marhaenisme dicetuskan Sukarno.

Penemuan istilah Marhaen sendiri masih menjadi polemik. Sebagai seorang ideolog, Sukarno kerap mengartikulasikan gagasan rumit dengan bahasa sederhana. Selain itu, kebiasaan Sukarno menggunakan akronim dalam kampanye dan propaganda politik melahirkan dugaan bahwa Marhaen merupakan sebuah akronim dari Marx, Hegel, dan Engels (Kuswono 2016, 124). Dugaan ini bertolak dari keyakinan bahwa Sukarno merupakan seorang Marxis yang mendasarkan diri pada teori dialektika Hegel dan pengembangan dialektika materialisme ala Marx dan Engels.

Secara historis, istilah Marhaen baru dipopulerkan Sukarno dalam pidato pembelaannya yang monumental "*Indonesia Menggugat*" di pengadilan kolonial Belanda tahun 1930. Popularitas istilah Marhaen pada pledoi itu bukan menunjukkan bahwa Marhaenisme baru dicetuskan pada tahun 1930. Asal-usul pemikiran Marhaenisme dapat ditelusuri jejaknya dari puncak kegagalan pergerakan nasional pada tahun 1926-1927 yang berujung pada pengasingan politik ke Boven Digoel. Benih-benih pemikiran Marhaenisme mulai terlihat dengan adanya konsepsi persatuan yang diabstraksi Sukarno dalam tulisan yang berjudul *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme* pada tahun 1926. Upaya merealisasikan ide-ide persatuan ideologis dalam tataran praksis juga berhasil diwujudkan dengan didirikannya Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927. Pada titik ini, Sukarno menjalankan prinsip-prinsip Marhaenistis dalam sebuah pergerakan politik. Walaupun istilah Marhaen belum populer pada periode PNI 1927, tetapi tidak dapat disangkal jejak-jejak genealogis pemikiran Marhaenisme Sukarno telah mengendap sejak lama termasuk dalam aktivitas politik PNI.

Sukarno mengisahkan pertemuan dengan Marhaen pertama kali dalam kuliah umum *Shaping and Reshaping Indonesia* di Bandung pada 3 Juli 1957 (Kasenda 2017, 40). Ketika berusia 20 tahun, ia bertemu dengan Marhaen di Bandung Selatan. Berdasar kisah ini artinya

pertemuan tersebut terjadi pada tahun 1921. Marhaen digambarkan sebagai sosok petani yang memiliki sebidang tanah dan alat-alat produksi sendiri, akan tetapi masih hidup dalam kemiskinan. Sukarno yang dihinggapi rasa penasaran terus bertanya mengenai kepemilikan tanah, cangkul, dan alat produksi lain kepada Marhaen.

Sang petani mengakui bahwa alat-alat produksi itu miliknya pribadi. Semua pekerjaan dilakukan dengan tenaga dan usaha sendiri. Meskipun Marhaen merupakan majikan atas dirinya sendiri, akan tetapi hasil yang diperoleh hanya cukup untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga semata. Ia hidup dalam kesusahan walaupun memiliki rumah, sebidang tanah, dan alat-alat produksi pribadi.

Marhaen merupakan orang yang memiliki alat-alat sedikit, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, dan hanya sekedar cukup untuk menghidupi dirinya sendiri (Adams 1966, 84). Sukarno berkesimpulan bahwa mayoritas bangsa Indonesia yang melarat justru bukan bekerja untuk orang lain dan bukan pula orang lain yang bekerja untuknya. Hal ini menunjukkan tidak ada penghisapan tenaga kerja manusia atas manusia lainnya. Bertolak belakang dengan kaum proletar yang terpaksa menjual tenaganya untuk bekerja dibawah perintah orang lain yang memungkinkan penghisapan antar sesama manusia. Meskipun begitu, hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Marhaen dan proletar memiliki kesamaan nasib yaitu dimiskinkan secara struktural. Berangkat dari realitas tersebut, Sukarno terinspirasi menamakan seluruh kaum tertindas dan marjinal Indonesia dengan istilah Marhaen.

Terlepas dari segala polemik mengenai keberadaan figur historis yang bernama Marhaen, dialog Sukarno dan sang petani dapat dianalisis sebagai suatu legitimasi politik untuk memberikan justifikasi bahwa ideologi baru ciptaan Sukarno berpihak kepada kaum marjinal di Indonesia. Narasi simbolik kemunculan Marhaenisme dibutuhkan agar ideologi ini memiliki keterkaitan historis dan emosional dengan golongan terpinggirkan. Narasi ini mampu menggerakkan kaum tertindas untuk melawan *status quo* dengan panduan teoritik. Sukarno menghendaki kesatuan teori dan praksis

dimana keduanya selalu diletakkan dalam konteks relasi produksi masyarakat Indonesia.

Konteks simbolisasi seorang petani miskin bernama Marhaen bertolak dari suatu analisis kelas sosial. Sukarno berupaya mengidentifikasi lapisan kelas sosial terbawah berdasar corak produksi sebagian besar masyarakat Indonesia yang sangat bergantung pada sektor agraria. Simbolisasi petani yang dilakukan Sukarno bukan menunjukkan bahwa ia mengabaikan golongan melarat lain di luar petani. Proletar bukanlah kelas tertindas mayoritas di Indonesia karena proses industrialisasi dan kapitalisme yang belum matang. Hal inilah yang mendasari Sukarno untuk tetap mengambil nama petani Marhaen sebagai simbol ideologis mewakili seluruh golongan marjinal. Alasan ini dapat dilacak dalam tulisan *Matahari Marhaenisme!* yang termuat dalam majalah *Fikiran Ra'jat* tahun 1932, Sukarno mengemukakan bahwa paham proletarisme tidak memadai keseluruhan golongan kaum tertindas, oleh sebab itu diperlukan istilah baru yang menggambarkan kelas sosial khas Indonesia yaitu Marhaen. Marhaen memadai seluruh kaum melarat Indonesia mulai dari kaum proletar maupun yang bukan proletar (Sukarno 1932d, 2). Istilah Marhaen dijadikan sebagai simbol kesengsaraan seluruh kaum tertindas di Indonesia yang meliputi buruh, nelayan, pedagang kecil, kusir kecil dan kaum melarat lainnya. Marhaenisme menjadi suatu tawaran persatuan kaum yang lemah untuk melawan kaum penindas.

Persatuan itu bukan hanya diwujudkan dalam konteks kelas sosial belaka, melainkan juga persatuan ideologis antara Nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme untuk melebur dalam Marhaenisme. Sebagaimana termuat dalam tulisan *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme* pada tahun 1926. Ia merumuskan penyatuan eklektik yang relevan dari berbagai konsepsi dari tiga ideologi itu. Gagasan ini bukanlah rumusan sembarang konsep yang saling bertentangan satu sama lain. Meskipun terdapat persatuan ideologis, Sukarno menganjurkan suatu tendensi keberpihakan kepada kaum Marhaen yang lemah. Itulah sebabnya Sukarno mengartikulasikan Marhaenisme sebagai nasionalisme Indonesia yang berpihak kepada kaum Marhaen (Sukarno

1932d, 2). Artikulasi ini ditunjukkan agar tercipta distingsi yang tegas antara Nasionalisme kaum lemah yang bercorak sosialis dan Nasionalisme kaum elite yang borjuis. Kepentingan kaum tertindas Marhaen berada di atas kepentingan kaum elite yang cenderung menindas. Sebagaimana ditekankan lebih jauh bahwa Marhaenisme adalah Sosialisme Indonesia dalam praktik (Adams 1966, 85). Dialektika antara pemikiran Sukarno dan Marxisme menghasilkan konsepsi sosialisme khas Indonesia yang nantinya menjadi ideologi perjuangan rakyat jelata untuk melawan feodalisme, kapitalisme, dan imperialisme.

Marhaenisme terdiri atas berbagai elemen penyatuan antara Nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme. Nasionalisme diidentifikasi sebagai unsur yang efektif untuk mempersatukan rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang. Sementara Marxisme merupakan unsur yang paling fundamental karena pisau analisis kelas sosial "Materialisme Historis" yang diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia mampu membaca lapisan kelas sosial terbawah yang unik. Unsur Islamisme merupakan penguat yang mencerminkan kultur religiositas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Filosofi Marhaenisme didasarkan pada penyatuan konsepsi, nilai-nilai, sekaligus kekuatan politik ideologis yang sedang berkembang pada masa itu. Sukarno mampu menyerap dan mengejawantahkan semua unsur yang tampak dan mengendap dalam masyarakat. Namun demikian, hal yang tidak dapat disangkal mengenai Marhaenisme adalah unsur Marxisme menempati posisi yang paling signifikan dibandingkan Nasionalisme dan Islamisme. Sukarno berulang kali menegaskan bahwa Marhaenisme merupakan Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dan dilaksanakan di Indonesia. Dalam bahasa Belanda, Sukarno mengartikulasikannya dengan "*Marhaenisme is het in indonesië toegepaste Marxisme*" (Departemen Penerangan RI 1964, 149–50).

Sukarno tidak pernah menyembunyikan aspek Marxisme yang dominan dalam corak pemikiran Marhaenisme. Ia bahkan secara eksplisit menyampaikan posisi penting Marxisme, sebagaimana ditegaskan bahwa Marhaenisme

tidak akan dapat dipahami tanpa terlebih dahulu memahami dua hal: pertama, pengetahuan mengenai situasi dan kondisi Indonesia. Kedua, pengetahuan mengenai Marxisme (DPP PNI 1964, 40). Unsur Nasionalisme dan Islamisme tidak lain merupakan faktor sekunder yang berfungsi sebagai perekat persatuan masyarakat Indonesia.

Jika Marhaenisme seolah terkesan diidentikkan dengan unsur Nasionalisme secara dominan, hal itu tidak lain karena Nasionalisme meleburkan berbagai kepentingan eksklusif dan sektarian yang mewujud dalam konsep persatuan nasional. Namun secara nyata, Sukarno memilah persatuan nasional itu dengan kriteria sosialistik. Meskipun konsepsi filosofis persatuan Sukarno sudah terbentuk dari corak pemikiran sinkretis Jawa dan eklektisisme Tjokroaminoto. Namun, dalam perjalanannya Sukarno menemukan konsep persatuan yang efektif dan politis dalam Nasionalisme.

Marhaenisme terbuka terhadap unsur-unsur ideologis yang berkembang di Indonesia. Sebagaimana unsur Nasionalisme yang dijadikan perekat persatuan elemen kebangsaan, Islamisme dijadikan perekat persatuan elemen keagamaan. Namun, hanya Marxisme yang dijadikan basis filsafat dalam fondasi ideologi Marhaenisme. Persoalannya dalam konteks masyarakat Indonesia, Marxisme cenderung mendapatkan stigma negatif karena asas materialisme yang secara tidak langsung berasosiasi dengan filsafat ateisme. Disinilah peran Sukarno meletakkan setiap unsur pemikiran dalam bangunan ideologis yang sesuai dengan karakter bangsa sehingga ateisme tertolak dalam Marhaenisme. Islamisme merupakan unsur teologis yang menjadi pembeda antara Marhaenisme dan Marxisme. Sukarno tidak punya tendensi meletakkan dialektika materialisme pada realitas dan alam. Sukarno menerapkan dialektika materialisme dalam konteks perkembangan masyarakat dan sejarah sebagaimana teori materialisme historis Marxisme. Disinilah letak fundamentalnya Marxisme pada Marhaenisme. Meniru seruan Marx terhadap persatuan kaum buruh, Sukarno menyerukan “*Kaoem Marhaen Seloeroeh Indonesia Bersatoelah*” (Sukarno 1932c, 16).

Pada periode PNI 1927, Marhaenisme merupakan paham politik yang bersifat laten. Meskipun begitu, *term* Marhaen sebagai suatu subjek politik mulai terbentuk dalam periode ini. Dalam artikel berjudul *Kakkerlakken* yang dimuat surat kabar *Zutpense Courant* pada 23 Oktober 1929, Marhaen diidentifikasi sebagai subjek gerakan rakyat “*volks-beweging*”. Marhaen merujuk pada golongan rakyat kecil dimana kaum priyayi tidak termasuk ke dalamnya (*Zutpense Courant* 1929). Dalam surat kabar tersebut sudah tergambar jelas corak sosialistik Marhaen sebagai golongan rakyat rendah yang dipisahkan dari golongan elite ningrat. Namun demikian, Sukarno baru mempopulerkan Marhaen sebagai suatu kelas sosial khas Indonesia dalam pledoi Indonesia Menggugat tahun 1930. Sukarno menempatkan pengertian Marhaen dan Kromo sebagai orang kecil yang hidup dalam penderitaan. Disitulah Sukarno menganggap kaum Kromo dan kaum Marhaen merupakan bagian terbesar dalam susunan pergaulan hidup masyarakat Indonesia (Sukarno 1951, 131).

Pasca pledoi tersebut, PNI dikenal sebagai penganut ideologi Marhaenisme. Dalam surat kabar *Het Nieuws Van Den Dag voor Nederlandsch-Indië*, PNI diakui sebagai gerakan politik demokratis yang berorientasi pada pembebasan rakyat Indonesia. Pembebasan yang dimaksud bukanlah pembebasan kaum tuan tanah dan kapitalis, melainkan pembebasan kaum tani dan buruh dari golongan Kromo dan Marhaen (*Het Nieuws Van Den Dag voor Nederlandsch-Indië* 1931).

Setelah PNI dibubarkan, Sukarno kerap mempropagandakan Marhaenisme dalam sebuah tulisan di majalah *Fikiran Ra'jat* tahun 1932-1933. Pada majalah tersebut, Sukarno menggaungkan Marhaenisme sebagai ideologi pembebasan dalam sebuah wadah partai politik pecahan PNI yang bernama Partai Indonesia (Partindo). Partindo merupakan partai politik pertama yang secara eksplisit menguraikan visi politik Maehaenisme secara komprehensif.

Pada tahun 1933, rumusan Sembilan Tesis Marhaenisme diputuskan dalam Kongres Partindo yang diselenggarakan di Kota Mataram. Kesembilan tesis itu antara lain sebagai berikut: Pertama, Marhaenisme adalah Sosio-

Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Kedua, Marhaen adalah kaum proletar, kaum tani melarat, dan seluruh kaum melarat Indonesia lainnya. Ketiga, Partindo menggunakan istilah Marhaen, alih-alih proletar. Istilah proletar sudah termuat di dalam istilah Marhaen, sementara istilah proletar berarti kaum tani dan kaum melarat lain tidak termuat di dalamnya. Keempat, Partindo berkeyakinan bahwa di dalam perjuangan, seluruh kaum melarat Indonesia harus menjadi elemen-elemennya, maka Partindo menggunakan istilah Marhaen itu. Kelima, di dalam perjuangan Marhaen, Partindo berkeyakinan bahwa kaum proletar mengambil bagian besar dalam perjuangan itu. Keenam, Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan negeri yang menyelamatkan kaum Marhaen. Ketujuh, Marhaenisme merupakan cara perjuangan revolusioner untuk mewujudkan susunan masyarakat dan negeri yang demikian itu. Kedelapan, Marhaenisme merupakan cara perjuangan dan azas yang menghendaki terhapusnya kapitalisme dan imperialisme. Kesembilan, Marhaenis yaitu setiap orang Indonesia yang menjalankan Marhaenisme (Sukarno 1965a, 253).

Marhaen dan Proletar: Subjek Politik Revolusioner (Analisis Materialisme Historis)

Rumusan Marhaen sebagai subjek politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bagaimana Sukarno mengadaptasi cara Marx mengidentifikasi Proletariat sebagai agen politik pembebasan. Proletariat merupakan kelas pekerja modern yang terkondisikan oleh sejarah antagonisme kelas. Marx menjelaskan sejarah antagonisme kelas sebagai pertentangan antara kaum penindas dan tertindas yang terjadi sepanjang zaman: majikan dan budak, *patricia* dan *plebeia*, serta tuan tanah dan budak tani. Pertentangan majikan dan budak merupakan karakteristik masyarakat perbudakan, pertentangan antara *patricia* (bangsawan) dan *plebeia* (rakyat jelata) pada masyarakat Romawi Kuno, serta pertentangan antara tuan tanah dan budak tani yang terjadi dalam masyarakat Abad Pertengahan (Marx and Engels 1910, 12).

Pergeseran subjek tertindas dalam antagonisme kelas selalu terjadi mengikuti perubahan kondisi material masyarakat. Meskipun begitu, pelapisan kelas sosial pada masyarakat perbudakan dan feodal bersifat kompleks dan bervariasi sehingga tidak dapat dipertajam menjadi pertentangan dua kelas semata. Marx menyatakan bahwa masyarakat borjuasi modern yang lahir dari reruntuhan masyarakat feodal justru menciptakan suatu bentuk dan kondisi penindasan baru. Karakter masyarakat borjuasi terlihat dari kecenderungannya untuk menajamkan pertentangan kelas. Sedikit berbeda dengan corak masyarakat perbudakan primitif dan feodal yang memiliki susunan pelapisan kelas sosial yang variatif. Sebagai contoh, adanya level gradasi pelapisan sosial pada masyarakat Romawi kuno dan Abad Pertengahan. Romawi kuno terdiri atas *patricia*, ksatria, *plebeia*, dan budak. Abad Pertengahan terdiri atas tuan tanah feodal, vassal, guild-masters (majikan serikat), journeymen (pekerja harian), pekerja magang, dan budak. Tentunya bertolak belakang dengan karakter masyarakat modern yang menyisakan keterpecahan tajam antar dua kelas: borjuasi dan proletariat (Marx and Engels 1910, 13). Marx menganggap proletariatlah yang akan menjadi kelas terdepan untuk menumbangkan masyarakat borjuasi menuju sosialisme.

Konsepsi Proletariat sebagai subjek revolusi menginspirasi Sukarno untuk mengidentifikasi dan menganalisis subjek revolusi dalam konteks Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi dan analisis tersebut kemudian terartikulasi pada seluruh golongan kaum lemah "Marhaen". Sukarno meminjam pisau analisis Marxisme "Materialisme Historis". Berdasar analisis materialisme historis, perubahan sejarah tidak ditentukan oleh kesadaran manusia, melainkan ditentukan oleh kondisi material manusia. Sebagaimana diungkapkan Marx dalam *The German Ideology* "*Life is not determined by consciousness, but consciousness by life*" (Marx and Engels 1947, 15).

Sukarno mengadopsi materialisme historis untuk membedah struktur pelapisan kelas sosial Indonesia berdasar cara produksi masyarakat.

Pemahaman ini meyakini bahwa suatu cara masyarakat mengorganisasi produksi menentukan struktur masyarakat tertentu. Marx menjelaskan secara sederhana “*penggilingan dengan tangan menghasilkan struktur masyarakat feodal, sementara penggilingan dengan mesin uap menghasilkan struktur masyarakat kapitalis*” (Magnis-Suseno 2018, 145).

Pada awal Abad ke-20, kondisi material masyarakat Indonesia berada dalam tegangan antara pranata masyarakat lama dan pranata masyarakat baru yaitu dialektika antara feodalisme dan kapitalisme industrial. Sukarno mengakui bahwa kapitalisme Indonesia merupakan suatu bentuk kapitalisme yang tumbuh dalam tatanan feodal. Perwujudannya yaitu kapitalisme yang berbasis pada industri pertanian. Ia menjelaskan bahwa industri yang berkembang di Indonesia tujuh puluh lima persen merupakan perusahaan perkebunan atau “*onderneming*” seperti *onderneming* gula, teh, kina, karet, tembakau, dan hasil pertanian lainnya (Sukarno 1965a, 256). Berangkat dari kondisi material tersebut, Sukarno menyimpulkan bahwa sebagian besar rakyat tertindas Bumiputera adalah kaum tani karena masih menggantungkan faktor produksi pada hasil perkebunan. Sebagaimana dipertegas dalam pidato *Vivere Pericoloso*, kaum tani Indonesia mengalami eksploitasi ganda dari feodalisme dan kapitalisme (Sukarno 1965b, 382). Meskipun begitu, tegangan antara feodalisme dan kapitalisme bukan hanya menghasilkan satu golongan kelas yang tertindas saja. Melainkan juga berbagai variasi lapisan kelas sosial rendahan seperti petani, buruh, nelayan, pedagang miskin, kusir kecil, dan kaum melarat lain.

Berdasar analisis materialisme historis, pengembangan alat-alat dan sarana produksi menuntut adanya peralihan corak produksi berbasis pertanian ke produksi berbasis industri manufaktur modern. Perubahan corak produksi inilah yang kemudian memicu pergeseran relasi produksi atau hubungan hak milik pada masyarakat lama. Sukarno menganggap perkembangan corak produksi masyarakat Indonesia belum sampai pada tahapan “*Zuivere Industrie*” atau industri murni sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat borjuasi Eropa, oleh

sebab itu rumusan kelas Marhaen sejatinya belum menggeser relasi produksi masyarakat lama seratus persen. Golongan masyarakat lemah bukan hanya yang tidak memiliki sarana produksi, melainkan juga kaum pemilik alat produksi kecil-kecilan. Hal inilah yang dimanfaatkan Sukarno untuk menyatukan seluruh golongan tertindas dalam satu wadah kelas Marhaen. Tujuannya adalah mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok marjinal kaum Bumiputera untuk menghadapi penindasan feodalisme, kapitalisme, dan imperialisme.

Meskipun Indonesia masih dalam tataran corak produksi feodalisme, Sukarno tidak pernah mengesampingkan posisi strategis kelas proletariat sebagai kelas pekerja modern yang paling maju dan memahami zaman. Pada poin kelima dalam sembilan tesis Marhaenisme ditekankan bahwa kelas proletariat mengambil bagian yang paling besar dalam perjuangan Marhaen (Sukarno 1965a, 253). Hal menarik dari poin tersebut, Sukarno menekankan keunggulan posisi proletar dari pada petani sebagai pelopor revolusi kaum Marhaen. Padahal kaum petani mencakup mayoritas susunan kelas Marhaen, berbanding terbalik dengan kaum proletar yang hanya menjadi golongan minoritas di dalamnya.

Penekanan proletar sebagai pelopor revolusi Marhaenis tidak dapat dipisahkan dari keniscayaan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sukarno memahami bahwa industrialisasi kapitalisme adalah suatu hal yang pasti terjadi di Indonesia. Satu-satunya kelas yang dapat diandalkan dalam menghadapi keniscayaan itu adalah proletariat. Sukarno menjelaskan bahwa kelas proletar lahir dari rahim kapitalisme dan imperialisme. Kedudukan proletar sebagai kelas yang tereksplotasi langsung sistem kapitalisme memungkinkan mereka mengerti rasionalitas dan irasionalitas sistem tersebut. Mereka mengenali mesin, listrik, pabrik, cara produksi kapitalisme, serta segala bentuk kemajuan modernisme Abad ke-20 (Sukarno 1965a, 255). Sementara kaum petani cenderung dianggap sebagai kaum terbelakang, kuno, dan kolot. Sukarno menjelaskan bahwa cara produksi mereka tidak berubah sejak masa Medang Kamulan hingga Majapahit. Mereka punya cara hidup, cara menanam, pertukaran hasil,

pembagian tanah dan pengaturan sosial-ekonomi lain yang sangat kuno. Mereka juga terjerembab ke dalam ideologi feodalisme. Contohnya: pengkultusan terhadap kaum ningrat "ningratisme" dan kepercayaan akan datangnya *messiah* Jawa "Ratu Adil" atau "Heru Cokro" yang dianggap akan membawa pembebasan bagi rakyat Jawa (Sukarno 1965a, 254–55).

Sukarno menguraikan perbedaan karakteristik antara kaum proletar dan kaum tani untuk menegaskan bahwa proletar merupakan kelas yang paling konkret, rasional, dan selaras dengan kemajuan zaman. Perlawanan atas kapitalisme dan imperialisme akan ditentukan oleh kedudukan strategis proletar. Mereka menggenggam hidup dan mati sistem kapitalisme karena posisi proletar dalam proses produksi.

Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi: Tahapan Menuju Masyarakat Sosialis Indonesia

Konsepsi Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi menempati posisi sentral dalam Marhaenisme ajaran Sukarno. Sebagaimana diketahui kedua konsep ini berada pada poin pertama dalam rumusan Sembilan tesis Marhaenisme tahun 1933. Formulasi dari kedua konsep ini juga tidak terlepas dari pengaruh kuat anasir Marxisme.

Rumusan Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi setidaknya dapat dilacak dari dua tulisan Sukarno yang dimuat *Fikiran Ra'jat* yaitu "*Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*" dan "*Demokrasi-Politik dan Demokrasi-Ekonomi II: Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi*". Dalam tulisan ini terlihat bagaimana kemampuan Sukarno menuangkan gagasan Marxisme di Indonesia.

Dalam *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi* tanggal 28 Oktober 1932, Sukarno mengajak kaum Marhaen untuk tidak terjebak pada perjuangan dangkal yang mencita-citakan demokrasi belaka. Sukarno menunjukkan antipatinya terhadap penerapan demokrasi di Eropa yang cenderung berpihak kepada kepentingan elite borjuis. Hal ini bukan tanpa alasan, kemunculan demokrasi modern yang bermula dari Revolusi Prancis memang syarat dengan kepentingan kelas pemodal borjuis. Pada

awalnya Revolusi seolah terkesan sebagai pertarungan antara kekuasaan aristokrat-feodal dengan kekuatan rakyat jelata. Namun, kesudahan dari revolusi justru kelas menengah atas, pengusaha, dan pemodal yang mengambil alih kekuasaan para tuan tanah feodal dan bangsawan. Rakyat jelata yang tidak memiliki kesadaran "*bewust*" hanya dimobilisasi sebagai alat dari kepentingan kelas borjuis (Sukarno 1932a, 2–3). Pemerintahan demokrasi modern berhasil menggeser kekuasaan autokrasi-feodal dengan mengatasnamakan pemerintahan rakyat.

Demokrasi jenis ini menawarkan hal baru yang tidak diperoleh pada pemerintahan autokrasi sebelumnya yaitu hak perwakilan atau utusan rakyat di dalam lembaga parlemen. Rakyat jelata ditawarkan ilusi kemerdekaan politik dalam parlemen, padahal sejatinya rakyat dari golongan kelas pekerja mengalami kesengsaraan yang menyiksa dalam negara demokrasi. Pemerintahan demokrasi modern menunjukkan keberpihakan palsu atas rakyat jelata. Negara demokrasi selalu ditopang oleh kapitalis, sebagaimana negara autokrasi ditopang oleh bangsawan.

Sukarno mengancam konsep demokrasi semacam ini yang secara nyata banyak diperjuangkan oleh kaum aktivis pergerakan. Demokrasi borjuis yang mengatasnamakan rakyat merupakan antitesis dari demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya. Disinilah kaum proletar seolah terbutakan oleh ilusi sebagai subjek politik yang merdeka untuk memilih utusan di parlemen, padahal di sisi lain mereka menjadi budak pemilik modal dalam setiap pabrik yang suatu saat mungkin saja mengusir dan memecat mereka kapanpun. Sebagaimana diungkapkan Jean Jaures, kaum borjuasi hanya berhasil menegakkan keadilan politik, bukan keadilan ekonomi (Sukarno 1932a, 3). Demokrasi kaum borjuasi tidak lain hanyalah demokrasi politik semata yaitu demokrasi yang hanya berorientasi pada kesetaraan politik tanpa berupaya mewujudkan kesetaraan ekonomi. Oleh sebab itu di akhir tulisan tersebut, Sukarno menawarkan demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya sebagaimana diungkapkan "*Demokrasi bagi Marhaen Indonesia adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi*" (Sukarno 1932a, 3).

Penjelasan eksplisit konsep Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi baru tertuang dalam tulisan berjudul *Demokrasi-Politik dan Demokrasi-Ekonomi II: Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi* yang dimuat *Fikiran Ra'jat* No. 19. Sukarno mengartikulasikan konsep Sosio-Nasionalisme sebagai antitesis dari Nasionalisme borjuis. Nasionalisme borjuis merupakan suatu bentuk Nasionalisme yang tidak memiliki kesadaran revolusioner untuk mengubah tatanan sosial yang menindas. Nasionalisme ini diikuti oleh kaum nasionalis yang cenderung berkiblat pada negara-negara kapitalis Amerika dan Inggris.

Berbanding terbalik dengan rumusan Sukarno, Sosio-Nasionalisme memiliki kesadaran revolusioner yang tidak terbatas pada kesadaran *Burgelijk Revolutionair* (borjuis revolusioner) yang hanya bertujuan mencapai kemerdekaan politik tanpa mewujudkan perbaikan masyarakat itu sendiri (Sukarno 1932b, 2). Sukarno memberikan distingsi antara kesadaran revolusioner nasionalis borjuis "*Burgelijk Revolutionair*" dengan kesadaran *Social Revolutionair* dan *Marhaenistisch Revolutionair*. Kesadaran revolusioner nasionalis borjuis cenderung menolak kesetaraan sosial ekonomi, sementara *social revolutionair* dan *marhaenistisch revolutionair* berpijak pada konsepsi Marxisme yang berorientasi nilai kesetaraan.

Sosio-Nasionalisme merupakan senjata ideologis kaum Marhaen untuk menciptakan masyarakat yang adil tanpa ketertindasan, bukan hanya sekedar mencapai kemerdekaan suatu bangsa sebagaimana yang diimpikan kaum nasionalis borjuis. Kemerdekaan suatu bangsa tidak menjamin hilangnya kemiskinan struktural. Oleh sebab itu, kemerdekaan tidak lain hanya dianggap sebagai suatu prakondisi terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia (Sukarno 1947, 266). Konsepsi kemerdekaan sebagai jembatan emas bermula pada titik ini.

Sukarno menekankan gagasan Sosio-Nasionalisme sebagai Nasionalisme yang berangkat dari realitas konkret dan bergerak dalam masyarakat, bukan nasionalisme kontemplatif yang mengawang-ngawang dalam dunia ide (Sukarno 1965a, 174). Titik pijak

Sukarno dalam menyelesaikan masalah politik dan ekonomi adalah realitas masyarakat Indonesia yang penuh dengan penindasan. Penindasan tersebut telah berjalan sejak lama ketika bangsawan feodal turut menopang legitimasi kekuasaan kolonial Belanda hingga kapitalisme-imperialisme yang tidak berhenti mengeruk kekayaan negeri. Gagasan Sosio-Nasionalisme diproyeksi untuk menjawab masalah tersebut. Namun, Sosio-Nasionalisme tidak dapat diaktualisasikan secara terpisah dari Sosio-Demokrasi.

Sosio-Demokrasi sangat tegas menolak tendensi politik borjuisme sebagaimana Sosio-Nasionalisme. Sosio-Demokrasi berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan sedikit golongan elitis (Pratama dkk. 2022). Sukarno menyampaikan bahwa Sosio-Demokrasi bukan jenis demokrasi ala Revolusi Prancis, Amerika, Inggris, Belanda, Jerman dan lainnya (Sukarno 1932b, 3). Demokrasi semacam itu hanya mengutamakan distribusi hak politik, akan tetapi meminggirkan hak ekonomi rakyat karena hak itu seolah eksklusif hanya terdistribusi pada sejumlah golongan elite borjuis.

Dalam tulisan *Mencapai Indonesia Merdeka*, Sukarno mengutarakan bahwa demokrasi Barat hanyalah alat kapitalisme. Ia mengartikulasikan demokrasi sebagai *dictatuur van het kapitalisme* "kediktatoran kapitalisme" (Sukarno 1965a, 320). Dalam skema demokrasi Barat, rakyat hanya diperalat untuk melanggengkan kepentingan borjuis (Widianto dkk. 2022). Oleh sebab itu, Sukarno mengecam kaum Marhaen yang menjadikan demokrasi Barat sebagai suatu tujuan perjuangan. Demokrasi ideal bagi Sukarno adalah demokrasi kerakyatan, bukan demokrasi borjuis. Demokrasi kerakyatan bertujuan mencapai masyarakat sosialisme. Sukarno menyeru kaum Marhaen untuk tidak berpuas diri mencapai kemerdekaan politik saja karena kemerdekaan merupakan suatu jembatan emas. Di seberang jembatan emas, masyarakat Indonesia harus diatur berdasar demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk menciptakan suatu masyarakat yang bebas dari kapitalisme dan imperialisme. Rakyat akan mengurus segala aspek kehidupan berdasar mekanisme demokrasi politik dan demokrasi ekonomi mulai dari politik,

diplomasi, pendidikan, kesenian, kebudayaan, pekerjaan, hingga ekonomi (Sukarno 1965a, 320–21). Aspek ekonomi menjadi faktor fundamental dari semua aspek.

Sukarno menghendaki penguasaan negara atas perusahaan-perusahaan besar. Negara juga harus dikelola oleh rakyat sendiri, bukan negara kapitalis-borjuis maupun negara autokrasi-feodal. Pengelolaan perusahaan negara harus memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Rakyat akan menerima hasil pembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan, pembagian tersebut akan dilaksanakan di bawah pengawasan rakyat. Sukarno mengecam segala bentuk pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara kapitalistik dimana hasil keuntungan hanya dibagikan kepada segelintir borjuis semata.

Inilah manifestasi Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi dalam pengelolaan urusan publik yang didasarkan pada kepentingan rakyat jelata. Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi merupakan konsepsi politik yang lahir dari pengumpulan Sukarno atas Marxisme. Tidak mengherankan jika kedua konsep itu dianggap sebagai hasil tiruan dari gagasan dua tahap revolusi ala Marxisme; pertama, revolusi demokratis; kedua, revolusi sosialis. Walaupun gagasan dua tahap revolusi lebih dikenal sebagai teori Marxisme-Leninisme (Komunisme), tetapi sejatinya akar teoritis gagasan tersebut bersumber dari Marx dan Engels.

Dalam tulisan *Manifesto of the Communist Party*, Marx dan Engels menjelaskan tahapan pertama revolusi yaitu menaikkan posisi kaum proletariat menjadi kelas penguasa untuk memenangkan perjuangan demokrasi. Sementara tahapan kedua yaitu ketika proletariat sebagai kelas penguasa mengambil alih kapital dari kaum borjuis dan memusatkan seluruh sarana produksi ke tangan negara. Marx dan Engels juga menegaskan langkah terakhir merupakan langkah despotik terhadap penghapusan hak-hak kepemilikan dan kondisi produksi borjuis. Langkah revolusioner itu tidak dapat dihindari sebagai upaya untuk merombak tatanan sosial lama (Marx and Engels 1910, 40–41). Tahapan pertama dimaksudkan sebagai revolusi demokratis yang bertujuan menghapuskan sisa-sisa feodalisme dan menciptakan prakondisi bagi

tahapan revolusi berikutnya. Tahapan kedua merupakan revolusi sosialis yang berupaya menggeser tatanan produksi kapitalisme dengan tatanan produksi sosialisme dimana sarana produksi dikuasai proletariat secara kolektif.

Bukan rahasia umum jika Sukarno mengadaptasi konsepsi dua tahap revolusi itu. Ia menyatakan bahwa revolusi sosialis tidak mungkin diwujudkan dengan “satu kali pukul”. Sebagaimana konsepsi Marxisme, ia turut menekankan langkah perjuangan nasional-demokratis yang bertujuan untuk melenyapkan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme sebelum masuk ke dalam tahapan perjuangan sosialisme (Sukarno 1965b, 357).

Hal ini senada dengan rumusan Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Sosio-Nasionalisme dapat diterjemahkan sebagai tahapan pertama revolusi nasional-demokratis dimana kaum Marhaen berupaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa penjajahan asing. Sosio-Demokrasi dapat diartikulasikan sebagai revolusi sosialisme yang berupaya menciptakan suatu tatanan sosial yang bebas dari penindasan suatu kelas atas kelas lainnya. Dalam kerangka Sosio-Nasionalisme, kemerdekaan politik hanyalah jembatan emas untuk melakukan revolusi sosial agar terlepas dari sisa-sisa feodalisme dan imperialisme. Sosio-Demokrasi adalah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia yang bebas dari belenggu kapitalisme bangsa asing dan bangsa sendiri.

Dalam tulisan *Kapitalisme Bangsa Sendiri?*, Sukarno membedakan dua jenis perjuangan: pertama, perjuangan nasional. Kedua, “*Klassentrijd*” atau perjuangan kelas. Disinilah bukti pemahaman Sukarno atas Marxisme tidaklah sempit dan dangkal. Sukarno menyadari perjuangan yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat itu bukanlah perjuangan kelas, melainkan perjuangan nasional. Hal itu disebabkan karena kondisi Indonesia yang masih dalam cengkeraman kolonialisme dan imperialisme asing. Perjuangan mencapai kemerdekaan nasional tidak dapat dengan cara mengutamakan perjuangan kelas. Sukarno menilai perjuangan kelas baru dapat dilakukan setelah kondisi kemerdekaan telah tercapai sebagaimana yang terjadi di Eropa dan Amerika.

Dalam konteks kolonial yang terjadi adalah pertentangan antar bangsa, sementara setelah merdeka yang terjadi adalah pertentangan kelas dalam suatu bangsa. Contohnya pertentangan kelas antara kaum borjuis dan proletariat di Amerika, Eropa, dan negeri-negeri lain yang telah merdeka. Pertentangan ini sedikit berbeda dengan kondisi Indonesia. Indonesia sebagai negeri terjajah, kapitalisme mulai berkembang dan masih dijalankan oleh bangsa asing.

Imperialisme dan kapitalisme asing menjadi sumber malapetaka bagi kaum Marhaen. Maka dari itu, Sukarno melihat bahwa perjuangan nasional harus diutamakan terlebih dahulu di atas perjuangan kelas (Sukarno 1965a, 183). Meskipun demikian, bukan berarti Sukarno menganggap rakyat tidak boleh melawan kerakusan kapitalisme bangsa sendiri (Sukarno 1965a, 184). Sebaliknya, ia justru menyeru peperangan atas kapitalisme bangsa sendiri karena kapitalisme merupakan *stelsel* yang menindas apapun identitas kebangsaannya.

Asmara Hadi sebagai seorang anak ideologis Sukarno memiliki penafsiran serupa atas Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Ia memberikan penjelasan dalam tulisan Sembilan Tesis Marhaenisme dan Pendjelasan Singkatnya. Asmara Hadi menganalisis bahwa perjuangan Marhaenisme harus melalui dua tahap yaitu Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Ia menganggap Sosio-Nasionalisme sebagai teori perjuangan yang berlaku dalam masa penjajahan. Sedangkan Sosio-Demokrasi adalah teori perjuangan yang dilakukan setelah penjajahan berakhir (Hadi 1958, 4). Dua tahap merupakan prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam masa kolonialisme, perjuangan revolusi cenderung dominan sebagai perjuangan bangsa. Sementara dalam kapitalisme, perjuangan revolusi mulai bergerak ke arah perjuangan kelas. Dalam konteks kolonialisme, Asmara Hadi menyatakan bahwa perjuangan kelas sejatinya masih tersembunyi di bawah perjuangan bangsa (Hadi 1958, 6). Hal ini menunjukkan dalam perjuangan nasional terdapat berbagai kepentingan kelas laten yang saling berkontradiksi.

Konsepsi perjuangan nasional yang diutamakan Sukarno sejatinya merupakan kontekstualisasi dari konsepsi dua tahap revolusi kelas pekerja ala Marxisme. Seruan Sukarno untuk memilih perjuangan nasional bukan menunjukkan penolakan atas perjuangan kelas, melainkan suatu tahapan dan prakondisi menuju perjuangan kelas.

Dalam tataran praktik, Sukarno kerap menyerukan persatuan dan perjuangan nasional bagi kaum Nasionalis, Islamis, dan Marxis yang ditujukan untuk menumbangkan kolonialisme Belanda. Sukarno bahkan mempertahankan gagasan persatuan nasional setelah Indonesia merdeka karena kapitalisme bangsa sendiri masih bersifat laten.

Simpulan

Marhaenisme merupakan ideologi emansipatoris yang lahir dari kekecewaan Sukarno atas kegagalan gerakan politik pergerakan nasional yang cenderung eksklusif dan sektarian. Sektarianisme dan eksklusivitas gerakan memicu pertarungan ideologi antar sesama aktivis perjuangan. Sukarno menawarkan suatu sintesis politik persatuan di bawah satu ideologi yang mewadahi seluruh kepentingan kaum terjajah. Marhaenisme diproyeksi menjadi wadah persatuan gerakan nasionalis, islamis, dan marxis.

Kemunculan Marhaenisme juga tidak dapat dilepaskan dari realitas Indonesia yang dibelenggu penindasan feodalisme, kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme. Dalam upaya menggali subjek politik revolusioner, Sukarno meminjam teori materialisme historis Marxisme untuk memahami struktur pelapisan kelas sosial pada masa kolonial Hindia Belanda. Kapitalisme Indonesia bertumbuh dalam iklim feodalisme sehingga proses industrialisasi menghasilkan industri perkebunan, alih-alih *Zuivere Industrie* atau industri murni.

Berdasar corak produksi masyarakat Indonesia yang masih dalam tegangan antara feodalisme dan kapitalisme, lapisan kelas sosial terbawah Indonesia terdiri atas berbagai golongan terpinggirkan mulai dari yang tidak memiliki alat produksi hingga pemilik alat produksi kecil: buruh, nelayan kecil, pedagang

kecil, dan petani. Seluruh lapisan kelas terbawah itu disatukan dalam kelas Marhaen. Kelas Marhaen merupakan sokoguru revolusi yang memungkinkan untuk mendobrak tatanan *status quo* menuju sosialisme Indonesia.

Penggalian kelas Marhaen sebagai agen pembebasan melalui kaca mata Materialisme Historis merupakan bukti posisi fundamental Marxisme terhadap landasan ideologi Marhaenisme. Marhaenisme dan Marxisme merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Marhaenisme sejatinya juga meyakini bahwa kelas proletariat merupakan kelas yang paling rasional dan maju, bahkan proletar harus mendapat bagian terbesar dalam perjuangan Marhaen sebagaimana termaktub dalam poin kelima sembilan tesis Marhaenisme.

Selain itu, konsepsi Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi adalah hasil adaptasi Sukarno atas konsep revolusi dua tahap Marxisme yang membagi perjuangan ke dalam dua fase yaitu revolusi demokratis dan revolusi sosialis. Sosio-Nasionalisme diterjemahkan sebagai perjuangan mencapai kemerdekaan politik yang bebas dari feodalisme dan imperialisme asing, sedangkan Sosio-Demokrasi diartikulasikan sebagai perjuangan mewujudkan masyarakat tanpa penindasan kelas. Visi Marhaenisme dan Marxisme adalah menjebol struktur masyarakat lama dan membangun masyarakat baru tanpa penghisapan.

Referensi

- Adams, Cindy. 1966. *Bung Karno: Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*. Gunung Agung.
- Departemen Penerangan RI. 1964. *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Departemen Penerangan RI.
- DPP PNI. 1964. *Njalakan Terus Api Marhaenisme!* Departemen Penerangan & Propaganda DPP PNI.
- Gerald, Galang. 2019. "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS." *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 1 (2): 134–57.
- <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268>.
- Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto*. Universitas Indonesia Press.
- Hadi, Asmara. 1958. *Sembilan Tesis Marhaenisme dan Pendjelasan Singkatnja*. Pengurus Besar Partindo.
- Het Nieuws Van Den Dag voor Nederlandsch-Indië*. 1931. "Vertrouwens-Politiek." November 12. No. 262 Edisi. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010229340:mpeg21:p001>.
- Kasenda, Peter. 2017. *Sukarno, Marxisme & Leninisme: akar pemikiran kiri & revolusi Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Kuswono, Kuswono. 2016. "Marhaenism: Social Ideology Create by Sukarno." *Historia* 4 (2): 119. <https://doi.org/10.24127/hj.v4i2.549>.
- Magnis-Suseno, Franz. 2018. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marx and Engels. 1910. *Manifesto of the Communist Party. Authorized English Translation: Edited and Annotated by Frederick Engels*. Charles H. Kerr & Company.
- Marx and Engels. 1947. *The German Ideology Parts I & III. Edited with an Introduction by R. Pascal*. International Publishers.
- Pratama, Febri Fajar, Ai Kusmiati Asyiah, dan Deni Chandra. 2022. "Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Sukarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 19 (1): 49. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33301>.
- Raeinady, Vhiasyah, dan Jagad Aditya Dewantara. 2021. "Pemikiran Soekarno dalam Ajaran Marhaenisme." *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (2): 457–65. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2293>
- Sukarno. 1932a. "Demokrasi-Politik dan Demokrasi-Ekonomi." *Fikiran Ra'jat* (Bandung), No. 18 Edisi.
- Sukarno. 1932b. "Demokrasi-Politik dan Demokrasi-Ekonomi II: Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi." *Fikiran Ra'jat* (Bandung), November 4. No. 19 Edisi.

- Sukarno. 1932c. "Kaoem Marhaen Bersatoelah." *Fikiran Ra'jat* (Bandung), Juli 15. No. 3 Edisi.
- Sukarno. 1932d. "Matahari Marhaenisme!" *Fikiran Ra'jat* (Bandung), Juli 1. No. 1 Edisi.
- Sukarno. 1947. *Sarinah: Kewadajiban Wanita Dalam Perdjongan Rebublik Indonesia*. The Sukarno Foundation.
- Sukarno. 1951. *Indonesia Menggugat*. SK Seno.
- Sukarno. 1965a. *Dibawah Bendera Revolusi Djilid I*. Panitia Penerbit.
- Sukarno. 1965b. *Dibawah Bendera Revolusi Djilid II*. Panitia Penerbit.
- Widianto, Bimo Rafi, Ahmad Ruslan, dan Desvian Bandarsyah. 2022. "Soekarno, Marhaenisme: Ideologi Pergerakan Kaum Melarat Indonesia (Sosialisme Soekarno)." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 10 (2): 139. <https://doi.org/10.24127/hj.v10i2.4022>.
- Zutpense Courant*. 1929. "Kakkerlakken?" No. 248. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRAZ02:000422099:mpeg21:p00005>.